

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 28 Februari 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (halaman 3)	Kamis, 28 Februari 2019	Perlu Kebersamaan Wujudkan Indonesia Bersih	Pemerintah mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah kepedulian pengelolaan sampah. hal itu diwujudkan dalam Gerakan Indonesia Bersih.
2	Media Indonesia (halaman 15)	Kamis, 28 Februari 2019	Butuh Sinergi Pacu Daya Saing	Era revolusi industry keempat (industry 4.0) ditandai dengan perkembangan otomatisasi, big data, kecerdasan buatan, dan segala hal yang berhubungan dengan internet. Hal itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberi banyak peluang dan pilihan baru bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usaha. Begitu pun dengan konsumen dalam menentukan pilihan selera.
3	Kompas (halaman 13)	Kamis, 28 Februari 2019	Kerja Sama Digalang untuk Mandalika	Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat akan mendatangkan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. "Kementerian Pariwisata berpartisipasi dengan memberikan 1 juta euro. Saya berharap uang itu bisa menjadi modal awal untuk memenuhi biaya penyelenggaraan," kata Arief. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan akan memasukkan biaya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika. "Biayanya akan kami ambilkan dari daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi, pembebasan lahan dan pembangunan jalan akan ditanggung oleh kami," kata Basuki.
4	Kompas (halaman 16)	Kamis, 28 Februari 2019	Koneksi di Jawa Bagian Selatan	Jalur penghubung di Jawa bagian selatan terus membaik. Pemerintah mengembangkan Bandar Udara Wiriadinata, Tasikmalaya, serta mempersiapkan infrastruktur lainnya.
5	Kompas (halaman 17)	Kamis, 28 Februari 2019	Yogyakarta Usulkan Industri Kreatif	Dua Kawasan industri di Derah Istimewa Yogyakarta diusulkan di kembangkan menjadi Kawasan ekonomi khusus bidang industri kreatif. Pengembangan itu dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi DIY yang memiliki potensi besar industri kreatif. Demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Budi Wibowo di sela-sela diskusi soal rencana pengusulan Kawasan ekonomi khusus (KEK), Rabu (27/2/2019), di Yogyakarta.
6	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Kamis, 28 Februari 2019	Konsorium Tanam Rp250 Miliar	Konsorium yang terdiri atas enam perusahaan menyiapkan investasi Rp250 miliar untuk pembangunan tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol Pejagan-Pemalang.
7	Bisnis Indonesia (halaman 8)	Kamis, 28 Februari 2019	NTT Tawarkan Akses Jalan & Air Bersih	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan akses jalan dan air bersih untuk mendukung pembangunan hotel dan bertumbuhnya pusat ekonomi baru di wilayah tersebut.

Judul	Perlu Kebersamaan Wujudkan Indonesia Bersih	Tanggal	Kamis, 28 Februari 2019
Media	Media Indonesia (halaman 3)		
Resume	Pemerintah mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah kepedulian pengelolaan sampah. Hal itu diwujudkan dalam Gerakan Indonesia Bersih		

Perlu Kebersamaan Wujudkan Indonesia Bersih

Fokus program Gerakan Indonesia Bersih memberikan penekanan pada peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas.

HAUFAN HASYIM SALENGKE
hasan_hasyim@mediaindonesia.com

PEMERINTAH mengajak seluruh pihak mewujudkan kesamaan langkah dan kepedulian pengelolaan sampah. Hal itu diwujudkan dalam Gerakan Indonesia Bersih.

Program Gerakan Indonesia Bersih merupakan salah satu Gerakan Revolusi Mental yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016.

"Fokus program Gerakan Indonesia Bersih memberikan penekanan pada peningkatan perilaku hidup bersih sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas. Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, seperti dikutip dari menlhk.go.id. Menteri Siti mengungkapkan hal itu pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pusat dan Daerah serta *launching* Gerakan Indonesia Bersih dalam acara Hari Peduli Sampah Nasional (HIPSN) di Jakarta, Kamis (21/2).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, meminta pada gubernur, wali kota, dan bupati yang hadir dalam rakernas itu untuk menaruh perhatian yang serius terkait persoalan sampah ini. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Puan Maharani, menyampaikan arahan tentang Revolusi Mental Gerakan Indonesia Bersih dengan membangun dan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal itu dapat dimulai dari setiap pribadi, lingkungan keluarga, sampai pada lingkungan yang lebih luas.

Hal-hal lain yang juga menjadi fokus Gerakan Indonesia Bersih ialah mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik. Kemudian, menyempurnakan peraturan perundang-undangan, pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah.

Gerakan tersebut mengutamakan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, KLHK telah merumuskan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pena-



PELUNCURAN GERAKAN INDONESIA BERSIH: (Dari kiri) Mendagri Tjahjoko Kumolo, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, bersama-sama mengangkat tangan saat Peluncuran Gerakan Indonesia Bersih di acara Rakernas Hari Peduli Sampah Nasional 2019 di Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (21/2).

nganan Sampah Laut.

Jakstranas Pengelolaan Sampah merupakan momentum besar penataan sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang memiliki target pengelolaan sampah 100% pada 2025. Itu dilakukan dengan upaya pengurangan sampah sebesar 30% dan upaya penanganan sampah sebesar 70%.

Hal tersebut merupakan perubahan paradigma besar karena pengurangan sampah 30% dilakukan dengan penerapan kebijakan *up-stream*

(hulu), dengan *mindset* 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Dengan jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa, timbulan sampah nasional diperkirakan 65,79 juta ton. Sementara itu, kapasitas TPA *sanitary landfill/controlled* 2016 sebesar 55% turun pada 2018 menjadi 44%.

Partisipasi masyarakat meningkat

Persoalan TPA (tempat pembuangan akhir) menjadi hal yang sangat mendasar karena *landfill* system menjadi sistem

utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia dan diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Salah satu amanat Perpres Nomor 97 Tahun 2017 menyebutkan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah maksimal satu tahun sejak ditetapkannya Jakstranas. Namun, hingga Januari 2019, baru 308 kabupa-

ten/kota dan 15 Provinsi yang telah menyelesaikan dokumen Jakstradanya.

Belakangan ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah cenderung meningkat. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK, dalam 4 tahun terakhir jumlah Bank Sampah meningkat signifikan dari 1.172 unit menjadi 7.488 unit.

Pada rangkaian HIPSN 2019, KLHK juga menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan,

seperti *clean up* yang serentak diselenggarakan pada 24 Februari 2019 di pantai dan sungai di delapan kota, yaitu Kendal, Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Rembang, Jepara, dan Kebumen. Rangkaian kegiatan lainnya ialah temu karya bank sampah, FGD dengan para champion di pemerintah daerah, komunitas dan *private sector*, lomba *video/vlog citizen journalism*, serta edukasi melalui animasi *web series* dan *comic strips*. (S1-25)

Judul	Butuh Sinergi Pacu Daya Saing	Tanggal	Kamis, 28 Februari 2019
Media	Media Indonesia (halaman 15)		
Resume	Era revolusi industri keempat (industry 4.0) ditandai dengan perkembangan otomatisasi, big data, kecerdasan buatan, dan segala hal yang berhubungan dengan internet. Hal itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberi banyak peluang dan pilihan baru bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usaha. Begitu pun dengan konsumen dalam menentukan pilihan selera.		

Butuh Sinergi Pacu Daya Saing

Salah satu indikator kesiapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 terlihat di dalam indeks daya saing global yang dikeluarkan World Economic Forum.

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

ERA revolusi industri keempat (industri 4.0) ditandai dengan perkembangan otomatisasi, *big data*, kecerdasan buatan, dan segala hal yang berhubungan dengan internet.

Hal itu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberi banyak peluang dan pilihan baru bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usaha. Begitu pun dengan konsumen dalam menentukan pilihan selera.

Pemerintah, kata Menkeu, telah menyiapkan sejumlah strategi agar Indonesia dapat bersaing di kancah global pada era tersebut. "Untuk memperbaiki kesiapan Indonesia memasuki revolusi industri 4.0 dibutuhkan berbagai elemen," ujar dia pada acara Kadin Entrepreneurship Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, kemarin.

Menkeu menjelaskan salah satu indikator kesiapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 terlihat di dalam *global competitiveness index* yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF). Pada 2018, Indeks daya saing Indonesia berada di posisi 45 dunia, naik dari sebelumnya

di posisi 47. Adapun untuk wilayah ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

"Ini adalah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk segera naik kelas," ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan World Economic Forum juga merilis 12 komponen untuk mengukur kesiapan suatu negara untuk masuk era industri 4.0 dengan peringkat masing-masing pada 2018 yang lalu (lihat grafik).

"Semuanya memerlukan program dan formula serta komitmen banyak pihak sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk meningkatkan ranking Indonesia pada tiap-tiap komponen itu," tegas Menkeu.

Salah satu upaya yang telah dilakukan, kata Menkeu, ialah melanjutkan pembangunan infrastruktur digital berupa pembangunan jaringan serat optik nasional Palapa Ring. Sampai saat ini, kata dia, telah terealisasi sebanyak 35.280 km kabel laut dan 21.807 km kabel darat.

Di samping itu, lanjut Menkeu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu antara lain dilakukan dengan penyediaan

beasiswa pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pemerintah (LPDP) yang telah mencapai 20.255 penerima.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani lebih menyoroti masih rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Menanggapi hal itu, Menkeu mengatakan, "Makanya, kenapa Presiden Joko Widodo fokus pada infrastruktur? Nonsens kita meningkatkan produktivitas kalau ongkos angkut saja di dalam negeri lebih mahal. Produktivitas tidak mungkin naik kalau tenaga kerja tidak punya *knowledge* dan *skill*."

Saat ini, pemerintah tengah menyusun peta jalan pengembangan SDM yang disusun Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Penekanan dalam peta jalan itu, menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, terletak pada peningkatan kualitas SDM, yakni sinkronisasi pendidikan dengan pelatihan.

"Poin berikutnya bagaimana menjembatani antara kebutuhan dunia kerja dan sektor pendidikan, serta mendorong kurikulum yang lebih memperbanyak unsur magang," ujarnya, pekan lalu. (E-2)

Judul	Kerja Sama Digalang untuk Mandalika	Tanggal	Kamis, 28 Februari 2019
Media	Kompas (halaman 13)		
Resume	Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat akan mendatangi wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. "Kementerian Pariwisata berpartisipasi dengan memberikan 1 juta euro. Saya berharap uang itu bisa menjadi modal awal untuk memenuhi biaya penyelenggaraan," kata Arief. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan akan memasukkan biaya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan bypass dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika. "Biayanya akan kami ambilkan dari daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi, pembebasan lahan dan pembangunan jalan akan ditanggung oleh kami," kata Basuki.		

Kerja Sama Digalang untuk Mandalika

Indonesia optimistis bisa menggelar MotoGP pada 2021. Pergelaran itu juga akan menarik wisatawan mancanegara ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

JAKARTA, KOMPAS — PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) optimistis bisa menggelar MotoGP pada 2021. Biaya penyelenggaraan sebesar 9 juta euro atau Rp 144 miliar akan dipenuhi melalui kerja sama PPI dengan sejumlah pihak.

Kerja sama yang akan digalang PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (PPI) adalah antarlembaga, kementerian, BUMN, dan swasta. Pabrik sepeda motor, seperti Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, dan KTM, juga ada di Indonesia sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai etalase produk otomotif ini.

"Melihat banyaknya pencinta kejuaraan balap motor di Indonesia, kami yakin bisa memenuhi kewajiban itu," kata Direktur Utama PPI Abdulbar M Masoer kepada *Kompas*, di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

PPI atau Indonesia Tourism Development Corporation akan bekerja sama dalam bentuk hak siar, hak penjualan cendera mata, serta hak promosi di area sirkuit dan kawasan Mandalika.

Adapun infrastruktur sirkuit, tambah Abdulbar, akan dibangun Vinci, perusahaan kontraktor asal Perancis. Mereka akan membangun jalan dan fasilitas balap lainnya. Investasi sebesar Rp 14 triliun ditanamkan bertahap selama 15 tahun.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat akan mendatangi wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. "Kementerian Pariwisata berpartisipasi dengan memberikan 1 juta euro. Saya berharap uang itu bisa menjadi modal awal untuk memenuhi biaya penyelenggaraan," kata Arief.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, akan memasukkan biaya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan *bypass* dari Bandara Internasional Lombok ke Mandalika. "Biayanya akan kami ambilkan

Rencana Induk Kawasan Destinasi Wisata Mandalika 2025



dari daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi, pembebasan lahan dan pembangunan jalan akan ditanggung oleh kami," kata Basuki.

Ditambah

VP Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) Handy Heryudhitiawan menambahkan, AP I akan meningkatkan kapasitas Bandara Internasional Lombok. Dengan demikian, bandara itu bisa menampung peserta MotoGP, seluruh tim, kru, dan penonton yang datang ke Lombok.

"Landasan akan diperpanjang dan diperkuat agar bisa didarati pesawat berbadan lebar. Landasan akan diperpan-

jang dari 2.750 meter menjadi 3.100 meter," kata Handy.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Suahyono, saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, rencana pembangunan jalan baru (*bypass*) Bandara Lombok-Mandalika masih dikaji pemerintah. Sebab, jalan penghubung yang ada saat ini dinilai masih mencukupi.

"Jalan dari bandara ke lokasi kawasan Mandalika sudah ditingkatkan kualitasnya. Volume lalu lintasnya masih relatif rendah sehingga masih memadai," kata Hadi.

Kajian itu terkait rencana penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. Namun, pemerin-

tah juga mempertimbangkan dampak jalan baru sepanjang 17 kilometer tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan, tahun ini LMAN tidak mengalokasikan dana untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat, KEK Mandalika termasuk sebagai proyek strategis nasional.

Berdasarkan verifikasi KPPIP per Januari 2019, KEK Mandalika dinyatakan telah beroperasi dengan investasi Rp 2,2 triliun. (ARN/NAD)

INFOGRAFIK: ROBERTUS ANDRI

Judul	Koneksi di Jawa Bagian Selatan	Tanggal	Kamis, 28 Februari 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Jalur penghubung di Jawa bagian selatan terus membaik. Pemerintah mengembangkan Bandar Udara Wiriadinata, Tasikmalaya, serta mempersiapkan infrastruktur lainnya.		

INFRASTRUKTUR

Konektivitas di Jawa Bagian Selatan

TASIKMALAYA, KOMPAS — Jalur perhubungan di Jawa bagian selatan terus membaik. Pemerintah mengembangkan Bandar Udara Wiriadinata, Tasikmalaya, serta mempersiapkan infrastruktur lain.

Presiden Joko Widodo, Rabu (27/2/2019) sore, menandatangani prasasti peresmian Terminal Bandara Wiriadinata. Sebelumnya, Presiden menghadiri Pembukaan Musyawarah Besar Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kota Banjar dan penyaluran kredit usaha rakyat di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya.

Presiden berharap ada tambahan penerbangan setelah terminal baru difungsikan. "Maret saya meminta Garuda menambah satu penerbangan lagi karena kelihatannya pasar menghendaki," kata Presiden kepada wartawan.

Bandara Wiriadinata dibuka untuk penerbangan sipil sejak Juni 2017. Pengembangan bandara dilakukan dengan

memperpanjang landas pacu dari 1.200 meter menjadi 1.600 meter. Selain itu, dibangun terminal baru.

Sejauh ini ada dua penerbangan dari Tasikmalaya, rute Tasikmalaya-Solo dan Tasikmalaya-Jakarta. Rute ini dilayani maskapai Wings Air.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendampingi Presiden mengatakan, landas pacu 1.600 meter memungkinkan pesawat jenis ATR beroperasi. Alternatif transportasi udara ini mempersingkat perjalanan dari Jakarta ke Tasikmalaya.

Saat ini, kata Budi, pembangunan jalur selatan-selatan dilakukan baik pada jalan tol, kereta api, reaktivasi jalur kereta api Cianjur, dan bandara di Sukabumi, Purwokerto, Kulon Progo, dan Kediri. "Wilayah Jawa bagian selatan bisa menjadi potensi baru wisata ataupun ekonomi," ujar Budi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Wali Kota

Tasikmalaya Budi Budiman menyatakan gembira karena pengembangan bandara Tasikmalaya dan bandara lain.

Terminal Tjilik Riwut

Setelah tertunda beberapa waktu, terminal baru Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mulai beroperasi minimal, Kamis (28/2). Kebijakan itu diambil setelah pengelolaan bandara diserahkan kepada Angkasa Pura II. Pembangunan terminal baru itu molor akibat pemangkasan anggaran pemerintah.

Pelaksana Tugas Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Cabang Palangkaraya Bandara Tjilik Riwut Paryono menjelaskan, Desember 2018 Kementerian Perhubungan melakukan kerja sama dengan Angkasa Pura II untuk pengelolaan Bandara Tjilik Riwut. Dengan itu, pembangunan tidak lagi menggunakan APBN, tetapi anggaran Angkasa Pura II. (INA/IDO)

Judul	Yogyakarta Usulkan Industri Kreatif	Tanggal	Kamis, 28 Februari 2019
Media	Kompas (halaman 17)		
Resume	Dua Kawasan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan di kembangkan menjadi Kawasan ekonomi khusus bidang industri kreatif. Pengembangan itu dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi DIY yang memiliki potensi besar industri kreatif. Demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Budi Wibowo di sela-sela diskusi soal rencana pengusulan Kawasan ekonomi khusus (KEK), Rabu (27/2/2019), di Yogyakarta.		

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Yogyakarta Usulkan Industri Kreatif

YOGYAKARTA, KOMPAS — Dua kawasan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus bidang industri kreatif. Pengembangan itu dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi DIY yang memiliki potensi besar industri kreatif.

Demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Budi Wibowo di sela-sela diskusi soal rencana pengusulan kawasan ekonomi khusus (KEK), Rabu (27/2/2019), di Yogyakarta.

KEK merupakan kawasan yang ditetapkan pemerintah untuk menyelenggarakan aktivitas perekonomian dengan fasilitas tertentu. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, wilayah yang telah ditetapkan bisa mendapatkan fasilitas atau keri-

nganan dalam beberapa bidang, misalnya perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Penetapan KEK dilakukan setelah ada kajian Dewan Nasional KEK yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian dan beranggotakan sejumlah menteri serta pejabat tinggi negara. Saat ini ada 12 KEK ditetapkan di Indonesia, tetapi tak ada yang di DIY.

Menurut Budi, kawasan industri yang diusulkan menjadi KEK adalah kawasan industri Piyungan di Kabupaten Bantul dan kawasan industri Sentolo di Kabupaten Kulon Progo.

Kawasan industri Piyungan yang dikelola PT Yogyakarta Isti Parama (YIP) mulai beroperasi. Sementara kawasan industri Sentolo yang dikelola PT Sentolo Isti Parama (SIP) belum beroperasi. Dua kawasan industri tersebut diusulkan untuk di-

integrasikan menjadi satu KEK. Usulan itu diajukan PT YIP.

Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2009, pembentukan KEK bisa diusulkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, ataupun badan usaha.

Budi menyatakan, KEK yang akan dikembangkan di DIY direncanakan mewadahi 16 subsektor industri kreatif, antara lain kerajinan, mode, desain, kuliner, musik, serta film dan fotografi. Apabila disetujui, KEK di DIY akan menjadi KEK pertama yang fokus di industri kreatif. Saat ini kelengkapan dokumen untuk pengusulan KEK mencapai 82,5 persen.

Chairman PT YIP Jimmy Gani mengatakan, KEK industri kreatif di DIY diharapkan bisa menghasilkan barang dan jasa yang menjadi bagian dari mata rantai ekonomi global, yakni diekspor. (HRS)

Judul	Konsorsium Tanam Rp250 Miliar	Tanggal	Kamis, 28 Februari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Konsorsium yang terdiri atas enam perusahaan menyiapkan investasi Rp250 miliar untuk pembangunan tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol Pejagan-Pemalang.		

Kamis, 28 Februari 2019

INFRASTRUKTUR

Bisnis Indonesia | 7



▶ REST AREA TOL PEJAGAN-PEMALANG

Konsorsium Tanam Rp250 Miliar

JAKARTA — Konsorsium yang terdiri atas enam perusahaan menyiapkan investasi Rp250 miliar untuk pembangunan tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol Pejagan—Pemalang.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) yang berlokasi di KM 260 ruas yang dikelola PT Waskita Toll Road itu akan memanfaatkan eks Pabrik Gula Banjaratma, Brebes. Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidianto mengatakan bahwa keenam perusahaan itu terdiri atas BUMN dan anak usahanya.

Perusahaan yang berhimpun di dalam konsorsium tersebut ada-

▶ **Konsorsium itu mendirikan PT PP Sinergi Banjaratma dengan setoran modal awal Rp12,58 miliar.**

lah PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT PP Properti Tbk., PT Jasamarga Properti, PT Perkebunan Nusantara IX, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Konsorsium itu mendirikan PT PP Sinergi Banjaratma dengan setoran modal awal sebesar Rp12,58 miliar. Saat ini, katanya, pekerjaan konstruksi masih berlangsung dan diharapkan rampung pada Agustus 2019.

"Kami usahakan Lebaran nanti sudah bisa beroperasi, tapi mungkin [fasilitasnya] tidak komplet," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (26/2).

Herwidianto menjelaskan bahwa TIP di KM 260 itu akan menjadi landmark dari jalan tol Pejagan—Pemalang.

Dia berpesan, TIP ini dibangun di lokasi yang istimewa, yaitu di Pabrik Gula Banjaratma. Pabrik gula berusia 175 tahun itu kini tidak lagi beroperasi.

Pengembangan TIP KM 260, lanjutnya, bakal menyerupai restorasi Pabrik Gula Tjolomadoe di Solo. Pabrik gula tersebut telah disulap menjadi wisata museum, ruang pertemuan, dan pertunjukan. Pengembangnya adalah PT Sinergi Colomado, konsorsium yang terdiri atas lima BUMN.

Selain PT Waskita Toll Road, operator jalan tol yang gencar membangun TIP adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Melalui anak usahanya yakni PT Jasamarga Properti, operator jalan tol pelat merah itu mengelola 27 TIP di lintas jalan tol Trans-Jawa.

Direktur Teknik PT Jasamarga Properti Tita Paulina Purbasari mengatakan bahwa hingga Februari 2019, perusahaan telah mengoperasikan delapan TIP di lima ruas jalan tol, yaitu Palimanan—Kanci (1 TIP), Batang—Semarang (1 TIP), Solo—Ngawi (3 TIP), Ngawi—Kertosono (2 TIP),

dan Surabaya—Mojokerto (1 TIP).

Tita menambahkan bahwa sebanyak enam TIP juga tengah dibangun dan sudah dibuka meski fasilitasnya terbatas. Keenam TIP itu berlokasi di ruas Batang—Semarang dan Solo—Ngawi.

"Kami menargetkan sebelum Lebaran sudah bisa beroperasi. Tidak semua rest area berukuran besar atau tipe A, tetapi ada juga yang kecil, tipe B," ujarnya, belum lama ini.

TIP dibagi ke dalam tiga tipe sebagaimana diatur Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol. Tipe A merupakan tipe dengan fasilitas paling lengkap dengan luas minimal 6 hektare, sedangkan tipe B minimal 3 hektare.

Fasilitas yang harus ada di dalam TIP tipe A yaitu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), anjungan tunai mandiri (ATM), toilet, klinik kesehatan, bengkel, dan kios. Selanjutnya minimarket, musala, restoran, ruang terbuka

Beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol.

- Pasal 25**
1. Pengusahaan TIP dilakukan dengan mengakomodasi UMK dan koperasi.
 2. Untuk mengakomodasi UMK dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial untuk UMK dan Koperasi; dan
 - b. pada jalan tol yang telah beroperasi, BUJT mengalokasikan lahan paling sedikit 20% dari total luas lahan area komersial secara bertahap untuk UMK dan Koperasi.

- Pasal 26**
1. Pengusahaan TIP harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi UMK dan koperasi dalam bentuk skema bagi hasil.
 2. Setiap UMK dan koperasi yang berada di TIP harus memiliki izin usaha mikro kecil (UMKM) dari pemerintah daerah.
 3. Pemberian kemudahan usaha kepada UMK dan koperasi dalam pengusahaan TIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 27**
1. UMK dan koperasi yang berada di TIP harus menetap pada suatu lokasi atau tidak boleh berpindah.
 2. UMK beroperasi pada satu lokasi yang telah ditentukan oleh BUJT dan dapat digunakan secara bersama dengan pengaturan pembagian waktu tertentu.

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2018
Tgl. TIP: tempat istirahat dan pelayanan

Glenn/Utomo Adiputra

hijau, dan sarana parkir. Sementara itu, luas dan fasilitas tipe B dan tipe C di bawah standar tipe A. Pengelola TIP juga berkewajiban mengalokasikan lahan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk membangun TIP, Jasamarga Properti merogoh kocek

cukup dalam.

Direktur Jasamarga Properti Dian Takdir Badryah mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir, perusahaan mengeluarkan biaya investasi Rp1,10 triliun—Rp1,20 triliun. Investasi bisa meningkat karena ada permintaan dari penyewa baru di beberapa TIP. ■

Judul	NTT Tawarkan Akses Jalan & Air Bersih	Tanggal	Kamis, 28 Februari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 8)		
Resume	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan akses jalan dan air bersih untuk mendukung pembangunan hotel dan bertumbuhnya pusat ekonomi baru di wilayah tersebut.		

► INFRASTRUKTUR PARIWISATA

NTT Tawarkan Akses Jalan & Air Bersih

DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan akses jalan dan air bersih untuk mendukung pembangunan hotel dan bertumbuhnya pusat ekonomi baru di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawa mengatakan, fasilitas lain yang dijanjikan adalah kemudahan pengurusan izin.

"Gubernur menginstruksikan untuk membangun akses jalan jika ada pembangunan hotel atau sarana pariwisata lainnya agar kepariwisataan NTT kian hidup," katanya, Selasa (26/2) petang.

Menurut Darmawa, kebijakan tersebut diambil untuk mendorong pembangunan di lahan-lahan milik sejumlah investor yang selama ini belum tergarap karena minimnya infrastruktur.

Dia menjelaskan, pada awal kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat telah mencaangkan kepariwisataan sebagai lokomotif pembangunan di NTT.

Sejumlah kendala yang menghambat pertumbuhan pariwisata pun diurai satu per satu, di antaranya masalah infrastruktur, pemetaan destinasi dan kalender kegiatan.

Selain itu, referensi detail potensi seni budaya dan pendukung kepariwisataan lainnya.

Selain itu juga melakukan promosi di antaranya akan mengikuti WTM London dengan menyewa gerai yang cukup luas untuk eksibisi dan pertunjukan seni budaya NTT.

Dia menyebut bahwa NTT membidik wisatawan dari kawasan Asia dan Eropa dengan tingkat

pembelanjaan dan lama tinggal yang panjang.

RUTE TRANSPORTASI

Saat ini dipikirkan pula untuk membuka sejumlah rute transportasi laut dan udara yang menghubungkan beberapa destinasi wisata yang selama ini tidak memiliki akses.

Darmawa mengatakan, suatu ketika sejumlah wisatawan yang berada di Sumba ingin melakukan perjalanan lanjutan ke Alor.

Akan tetapi karena tidak ada penerbangan urung dilakukan.

Kesulitan juga dihadapi ketika akan menggarap pasar wisatawan Australia yang secara geografis berdekatan dengan NTT.

"Kami akan melakukan pendekatan untuk menambah penerbangan langsung dari beberapa kota di Australia ke Kupang. Hal itu agar mempermudah akses masuk."

Yulita Day, Sales Manager Lelewatu Resort, Wanokaka, Sumba Barat menyambut baik kebijakan Pemprov NTT untuk serius menggarap kepariwisataan, terutama rencana menyertakan industri untuk mengikuti berbagai kegiatan promosi pariwisata ke luar negeri.

Dia juga berharap sejumlah agenda aktivitas pariwisata dan festival ditentukan waktunya secara permanen.

Hal itu agar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara memiliki jadwal pasti dalam melakukan perjalanan.

Dengan demikian, wisatawan akan semakin mudah berkunjung ke destinasi di kawasan NTT. (Ema

Sukarelawanto)